



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**  
Jalan Pendidikan No. Putussibau Kode Pos 78711  
Telp. (0567) 21133 Fax. (0567) 21133

---

Putussibau, 6 Juli 2022

Kepada

Nomor : 700/146/INKAB/IB3  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu

di Putussibau

---

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan Reviu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 700/129/INKAB/IB4
2. Reviu bertujuan untuk meyakini LKE Unit PMPRB yang telah disusun oleh asesor unit perangkat daerah baik secara offline maupun online, meyakini dokumen pendukung/evidence yang telah disusun oleh tim asesor unit perangkat daerah sudah sesuai ketentuan, membantu Pemerintah Daerah dalam menyajikan data pelaksanaan PMPRB sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memperoleh data yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi pada perangkat daerah.
3. Adapun hasil reviu PMPRB atas Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Unit adalah sebagai berikut :

- a. Nilai hasil rewiu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah **18,47**.
- b. Pengisian LKE Unit beserta kelengkapan dokumen sudah sepenuhnya terisi dan dilengkapi dalam bentuk Soft Copy;
- c. Terdapat beberapa catatan hasil rewiu yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki.

Demikian hasil rewiu ini disampaikan, untuk dapat diperbaiki dan ditindaklanjuti pada pelaksanaan PMPRB selanjutnya.



Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu

**BUNG TOMO, S.Hut, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP.19700604 199803 1 009

Tembusan:

1. Bupati Kapuas Hulu (Ketua Pengarah RB)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu (Ketua Tim Pelaksana RB)



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**INSPEKTORAT KABUPATEN**  
Jalan Pendidikan No. Putussibau Kode Pos 78711  
Telp. (0567) 21133 Fax. (0567) 21133

---

**CATATAN HASIL REVIU**  
**PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI**  
**ATAS LEMBAR KERJA EVALUASI UNIT PADA**  
**DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Surat Perintah Tugas Plt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 700/129/INKAB/IB4, Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu telah melaksanakan reviu PMPRB atas LKE Unit pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dengan hasil reviu sebagai berikut :

**1. Tujuan Reviu**

Tujuan Reviu adalah untuk:

1. Meyakini LKE Unit PMPRB yang telah disusun oleh tim asesor unit perangkat daerah baik secara offline maupun online;
2. Meyakini dokumen pendukung/*evidence* yang telah disusun oleh asesor unit perangkat daerah sudah sesuai ketentuan;
3. Membantu Pemerintah daerah dalam menyajikan data pelaksanaan PMPRB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Meningkatkan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memperoleh data yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan reformasi birokrasi oleh perangkat daerah.

**2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup reviu PMPRB meliputi LKE Unit PMPRB yang disusun secara offline dan online serta bukti pendukung/*evidence* pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2021 s.d. bulan April tahun 2022 yang dilaporkan pada tahun 2022.

**3. Waktu Pelaksanaan Reviu**

Reviu PMPRB dilaksanakan pada tanggal 20 Mei s.d 30 Juni 2022.

**4. Objek Reviu**

Pelaksanaan PMPRB pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu meliputi 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi.

**5. Hasil Reviu**

Adapun hasil PMPRB atas LKE Unit Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu yang telah direviu, sebagai berikut:

No	Penilaian	Bobot	Nilai
<b>A.</b>	<b>PENGUNGKIT</b>	<b>36,30</b>	<b>18,47</b>
<b>I.</b>	<b>PEMENUHAN</b>	<b>14,60</b>	<b>7,11</b>
1	Manajemen Perubahan	2,00	1,29
2	Deregulasi Kebijakan	1,00	0,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	1,34
4	Penataan Tatalaksana	1,00	0,76
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,35
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50	1,12
7	Penguatan Pengawasan	2,20	0,00
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	1,26
<b>II.</b>	<b>REFORM</b>	<b>21,70</b>	<b>11,36</b>
1	Manajemen Perubahan	3,00	0,42
2	Deregulasi Kebijakan	2,00	1,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50	1,50
4	Penataan Tatalaksana	3,75	1,75
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00	1,50
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75	2,83
7	Penguatan Pengawasan	1,95	1,95
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	3,75	0,41

Dari hasil revidu revidu Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah **18,47**

#### 6. Catatan untuk ditindaklanjuti

Untuk meningkatkan kualitas tatakelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani dilingkungan Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, berikut ini kami sampaikan beberapa hal yang perlu disempurnakan yaitu :

##### a. Manajemen Perubahan

1. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja
2. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
3. Dokumen Road Map belum lengkap disusun

4. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) terhadap Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
5. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti
6. Belum terdapat lampiran dokumen bahwa Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan

**b. Deregulasi Kebijakan**

1. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat
2. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat
3. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya

**c. Penataan dan Penguatan Organisasi**

1. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi
2. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi
3. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan

**d. Penataan tatalaksana**

1. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP
2. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP
3. Seluruh prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan
4. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi

**e. Penataan Sistem Manajemen SDM**

1. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi
2. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan
3. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai

**f. Penguatan Akuntabilitas**

1. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra
2. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja
3. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala
4. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja
5. Jumlah anggaran total dan jumlah anggaran yang berhasil difocussing belum dicantumkan

#### **g. Penguatan Pengawasan**

1. Belum dilakukan public campaign
2. Penanganan gratifikasi belum diimplementasikan
3. Belum dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi
4. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi belum ditindaklanjuti
5. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian
6. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko
7. Belum dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
8. Sistem Pengendalian Internal (SPI) belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait
9. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern
10. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI
11. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat
12. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi
13. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti
14. Whistle Blowing System belum disosialisasikan
15. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan dan diimplementasikan
16. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan
17. Belum dilakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas level unit kerja
18. Belum dilakukan Pembangunan Zona Integritas
19. Belum dilakukan evaluasi atas Pembangunan Zona Integritas

#### **h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

1. Belum dilakukan rewiu dan perbaikan atas standar pelayanan
2. Belum terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan
3. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar
4. Belum terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
5. Belum terdapat inovasi pelayanan yang cepat dan efektif
6. Belum melampirkan bukti dokumen yang menyatakan telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan
7. Belum melampirkan bukti dokumen telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi
8. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan hanya 1 kali dalam setahun
9. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat

### **7. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil Reviu LKE Unit PMPRB pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Pengisian LKE Unit beserta kelengkapan dokumen sudah terisi dan dilengkapi dalam bentuk Soft Copy;
- b. Nilai Reformasi Birokrasi pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu adalah **18,47**.
- c. Terdapat beberapa catatan hasil rewiu yang harus ditindaklanjuti dan diperbaiki.

Demikian Catatan Hasil Reviu PMPRB atas LKE Unit pada Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Kapuas Hulu, kami mengapresiasi upaya Saudara beserta seluruh jajaran telah mengimplementasikan pelaksanaan reformasi birokrasi.



Pt. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu

**BUNG TOMO, S.Hut, M.M.**

Pembina Utama Muda  
NIP.19700604 199803 1 009